**Community Engagement & Emergence Journal**
Volume 8 Nomor 1, Tahun 2027
Halaman : 144-159

# *Fortress Of Exclusion:* Sekuritisasi Migrasi Oleh Pemerintah Italia Dalam Kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni

# *Fortress Of Exclusion: The Securitization Of Migration By The Italian Government Under Prime Minister Giorgia Meloni*

**Yusri Hadi Nandika**
Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia
yusri.hadi51@ui.ac.id

***Abstract***

*Migration has become a complex issue faced by European Union (EU) member states following the 2015 refugee crisis, including Italy. This situation has become increasingly complicated due to the perception that migration is closely associated with other illegal activities, such as human trafficking networks and labor and sexual exploitation. Since her leadership campaign in 2022, Giorgia Meloni, as Prime Minister of Italy, has consistently framed migration as a threat by emphasizing the risk of Italy becoming the primary gateway for large-scale migration flows into the European Union. Meloni successfully gained public support for her firm stance on migration by promising to curb the flow of irregular migrants and deport those who fail to meet the criteria for asylum protection. Meloni subsequently demonstrated her commitment through the implementation of various anti-migration policies beginning in 2022, including the signing of the Italy–Albania Agreement to establish migrant detention centers, involving military personnel in their operation. These centers were designed to facilitate the processing and deportation of migrants without requiring them to enter Italian territory. Although these policies have sparked controversy for being perceived as disregarding migrants' fundamental rights and have drawn criticism from various civil society advocacy groups and international organizations, the Italian government has continued to implement restrictive migration policies. Based on the aforementioned issues, this study seeks to explain how the Italian government under the leadership of Prime Minister Giorgia Meloni constructs migration as a security issue. Barry Buzan et al.'s securitization theory is employed as the analytical framework to address the research question. This study adopts a literature review methodology drawing on various sources, including: (1) books and scholarly literature on international relations theory; (2) news articles and academic journals addressing relevant issues; and (3) official statements issued by the parties involved.*

***Keywords:*** *Italy, Giorgia Meloni, Migration, Securitization.*

**Abstrak**

Migrasi menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara Uni Eropa pasca krisis pengungsi di tahun 2015, termasuk Italia. Situasi ini semakin rumit dengan adanya persepsi bahwa migrasi berkaitan erat dengan aktivitas ilegal lainnya seperti jaringan perdagangan manusia hingga eksploitasi tenaga kerja dan seksual. Sejak kampanye kepemimpinannya di tahun 2022 silam, Giorgia Meloni sebagai Perdana Menteri Italia secara intensif mengangkat isu migrasi sebagai ancaman dengan menyoroti resiko Italia menjadi pintu masuk utama gelombang migrasi besar-besaran menuju Uni Eropa. Meloni berhasil memperoleh dukungan masyarakat Italia atas sikap tegas terhadap persoalan migrasi dengan janji untuk membendung arus migran ilegal dan mendeportasi migran yang gagal memenuhi kriteria perlindungan suaka. Meloni lalu menunjukkan keseriusannya dengan melancarkan berbagai kebijakan anti-migrasi sejak 2022, termasuk penandatanganan perjanjian Italia-Albania untuk membangun pusat penahanan migran dengan melibatkan personel militer dalam mengoperasikan pusat-pusat penahanan yang memungkinkan pemrosesan dan deportasi migran tanpa memasuki wilayah Italia. Walaupun kebijakan tersebut menuai kontroversi karena dianggap mengabaikan hak-hak dasar migran dan memicu kritik dari berbagai kelompok advokasi masyarakat sipil dan organisasi internasional, implementasi kebijakan restriktif terus dijalankan oleh pemerintah Italia. Berdasarkan kasus yang telah dikemukakan, Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintah Italia dalam kepemimpinan Perdana Menteri Georgia Meloni mengkonstruksi migrasi sebagai isu keamanan. Teori sekuritisasi oleh Barry Buzan et. al. akan digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dari

*https://journal.yrpipku.com/index.php/ceej*
***e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868***
*Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license*

berbagai sumber meliputi (1) buku dan literatur mengenai teori hubungan internasional; (2) artikel berita dan jurnal mengenai isu yang relevan; dan (3) pernyataan resmi dari pihak-pihak yang terlibat.
**Kata Kunci :** Italia, Giorgia Meloni, Migrasi, Sekuritisasi.

## 1. Pendahuluan

Migrasi global telah menimbulkan berbagai tantangan kompleks bagi negara-negara penerima. Pada akhir tahun 2022, jumlah migran di dunia telah mencapai angka rekor dengan 281 juta migran internasional, sementara jumlah pengungsi akibat konflik, kekerasan dan bencana mencapai 117 juta orang (IOM, 2024). Fenomena perpindahan masif ini telah menimbulkan dilema dan kekhawatiran mengenai layanan publik, harga dan segregasi perumahan, serta kekhawatiran mengenai kejahatan dan keamanan (World Development Report, World Bank, 2023). Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan polarisasi opini publik terhadap isu migrasi dan memicu gelombang populisme anti-imigran di berbagai negara.

Uni Eropa menghadapi lonjakan dramatis kedatangan migran pada krisis pengungsi 2015, tak terkecuali Italia. Lebih dari satu juta orang mencapai Eropa melalui wilayah Mediterania pada 2015, terutama ke Yunani dan Italia, dengan 3.735 orang tewas atau hilang (UNHCR, 2015). Italia menerima lebih dari 120.000 kedatangan melalui rute Mediterania Tengah antara Januari hingga September 2015 dengan mayoritas migran berasal dari Suriah, Afghanistan, Irak, Eritrea, dan Somalia yang melarikan diri dari konflik dan persekusi (Migration Policy Institute, 2015). Masuknya gelombang migran ini menciptakan tekanan luar biasa terhadap sistem penerimaan Italia dengan kapasitas dan infrastruktur institusional yang masih terbatas.

Krisis sistemik infrastruktur penerimaan migran menjadi masalah serius di Italia. Reformasi dalam model manajemen penerimaan migran justru memperburuk kondisi di berbagai pusat penerimaan, banyak di antaranya beroperasi jauh di atas kapasitas dan kekurangan tenaga profesional yang memadai (Pepe, 2024). Sebagai contoh, hotspot di Pulau Lampedusa memiliki kapasitas resmi hanya 389 orang namun kerap menampung hingga lebih dari 3.200 migran—delapan kali lipat dari kapasitasnya pada Februari 2023 (Asylum Information Database, 2023). Kondisi yang tidak memadai ini telah memicu kritik luas dari komunitas internasional terhadap tata kelola sistem penerimaan migran Italia.

Pemerintah Italia cenderung menerapkan pendekatan yang relatif konsisten dalam membatasi migrasi ilegal. Data menunjukkan pola *bipartisanship* dalam kebijakan luar negeri migrasi Italia yang mengindikasikan tingkat kontinuitas signifikan melampaui orientasi politik kabinet yang berkuasa (Rosina, 2019, p. 706). Pada periode 2015–2018, pemerintah berhaluan tengah-kiri berupaya memperkuat kontrol eksternal terhadap arus migrasi melalui kerja sama dengan Libya, meskipun reformasi internal dalam sistem penerimaan masih terbatas (Denison, 2020, p. 447). Namun, langkah tersebut dipandang terlalu moderat oleh kelompok sayap kanan, yang menuntut pendekatan lebih keras berupa penutupan pelabuhan bagi kapal penyelamat migran dan peningkatan keterlibatan militer dalam patroli perbatasan.

Giorgia Meloni menghadirkan pendekatan yang kontras, sejalan dengan latar belakangnya sebagai pemimpin *Brothers of Italy* — salah satu partai kanan populis paling menonjol di Uni Eropa karena keberhasilannya membawa ideologi nasionalis-konservatif ke pusat kekuasaan pemerintahan Italia. Slogan "*blocco navale*" (blokade angkatan laut) menjadi sorotan kampanye Meloni dengan foto-foto kapal migran yang

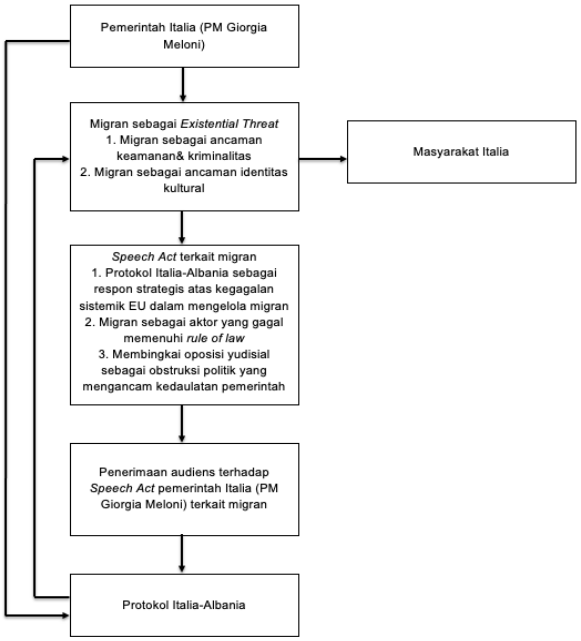
penuh sesak, dengan berjanji menghentikan semua kapal migran mendarat di pantai Italia (Nadeau, 2023). Meloni juga menolak "*Ius Scholae*," rancangan undang-undang yang mengusulkan hak kewarganegaraan bagi siswa di bawah 12 tahun yang berimigrasi ke Italia untuk pendidikan mereka, dan menggambarkan langkah-langkah pro-imigrasi sebagai bagian dari konspirasi sayap kiri untuk "menggantikan orang Italia dengan imigran" (Williams, 2022). Retorika agresif ini mencerminkan radikalisasi wacana migrasi yang membedakan Meloni dari pendahulunya.

Pergeseran isu migrasi dari dimensi kemanusiaan menjadi ancaman keamanan semakin menguat di Italia. Di Italia, 63% responden pada survei Eurobarometer Musim Gugur 2023 mempersepsikan migrasi sebagai "sangat negatif" atau "total negatif" (Mancini, 2023). Persepsi migrasi sebagai ancaman keamanan nasional telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan label 'negatif' yang digunakan untuk membenarkan pengawasan yang lebih besar, penahanan, deportasi, dan kebijakan yang lebih restriktif (Bahar, 2021). Pergeseran ini menciptakan ruang politik bagi Meloni untuk menerapkan Protokol Italia-Albania sebagai *extraordinary measure* dalam menangani isu migrasi, menandai transformasi radikal dari pendekatan kemanusiaan tradisional menuju kebijakan berbasis keamanan.

## 2. Metode

### Model Analisis

Dalam menganalisis proses sekuritisasi isu migrasi melalui kebijakan Protokol Italia-Albania tentang pembangunan pusat penahanan migran di bawah kepemimpinan PM Giorgia Meloni, diagram model analisis di bawah akan digunakan sebagai kerangka acuan awal. Model analisis ini berpegang pada urutan konseptual variabel sebagaimana dirumuskan dalam teori sekuritisasi, namun dioperasionalkan secara adaptif untuk mengakomodasi variasi, kontestasi dan fragmentasi yang muncul dari temuan empiris. Model analisis kemudian akan diolah kembali pada bagian refleksi guna mengevaluasi sejauh mana model sekuritisasi yang digunakan mampu menjelaskan kompleksitas dan keterbatasan dalam konteks empirik yang dihadapi.




**Gambar 1. Grafik Model Analisa Sekuritisasi Migrasi di Italia merujuk pada Buzan**

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Pemerintah Italia sebagai Aktor Sekuritisasi

Kebijakan migrasi Italia mengalami transformasi bertahap dari pendekatan pragmatis menuju pendekatan berbasis keamanan dalam tiga dekade terakhir. Pemerintahan koalisi kanan-tengah di bawah Perdana Menteri Silvio Berlusconi (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011) menerapkan kebijakan migrasi yang relatif akomodatif melalui mekanisme legalisasi massal sebagai instrumen utama penanganan pendatang tanpa dokumen. Undang-Undang Bossi-Fini tahun 2002 memberikan legalisasi status kepada sekitar 634.000 orang, yang mencerminkan kompromi antara kontrol imigrasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Italia (Finotelli, 2023). Periode pemerintahan Berlusconi juga mencatat pembukaan kuota pekerja migran yang relatif besar, dengan rata-rata 170.000 izin kerja dikeluarkan setiap tahunnya antara 2006-2008 untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian, konstruksi, dan manufaktur (Rosina, 2019, p. 700). Pemerintahan Mario Monti (2011-2013), Enrico Letta (2013-2014) serta Matteo Renzi (2014-2016) cenderung melanjutkan pendekatan akomodatif dengan fokus pada integrasi ekonomi migran dan koordinasi kebijakan tingkat Uni Eropa (Echeverria & Finotelli, 2024, p. 234). Pada periode Renzi, Italia bahkan meluncurkan operasi Mare Nostrum (Oktober 2013-Oktober 2014) yang menyelamatkan lebih dari 150.000 migran di Laut Mediterania, merefleksikan pendekatan humaniter terhadap krisis migrasi (Echeverria & Finotelli, 2024, p. 234).

Krisis pengungsi Eropa 2015 yang membawa lebih dari satu juta migran ke Eropa melalui rute Mediterania menjadi titik balik fundamental bagi arah kebijakan migrasi Italia. Kedatangan 181.436 migran ke Italia pada 2016 memicu eskalasi sentimen anti-imigrasi yang dieksploitasi oleh partai sayap kanan (UNHCR, 2015). Pergeseran signifikan terjadi ketika Matteo Salvini memimpin Lega Nord dan mengusung "Italians First" (*Prima gli Italiani*) yang secara eksplisit membingkai migrasi sebagai ancaman keamanan nasional. Salvini sebagai Menteri Dalam Negeri (2018-2019) memperkenalkan Dekrit Keamanan yang membatasi perlindungan kemanusiaan, menutup pelabuhan bagi kapal penyelamat migran, dan mengkriminalisasi operasi penyelamatan di laut Italia (Denison, 2020, p. 430-435). Era Salvini menandai awal sekuritisasi sistematis terhadap migrasi, menciptakan preseden politik yang kemudian dimanfaatkan dan diintensifkan oleh Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni mulai mengintensifkan kampanye anti-imigrasi pada 2019 seiring melemahnya koalisi Salvini dan meningkatnya kesempatan elektoral bagi FdI (Fratelli d'Italia). Pada pemilu Eropa Mei 2019, FdI meraih 6,4 persen suara, meningkat dari 4,4 persen pada pemilu nasional 2018 dan menandakan momentum politik yang dapat dieksploitasi (Echeverria & Finotelli, 2024, p. 235). Meloni secara strategis memposisikan FdI sebagai partai sayap kanan yang lebih konsisten dibanding Lega yang dinilai terlalu berkompromi dalam koalisi pemerintahan (Grillo & Ventura, 2023). Terpilihnya Giorgia Meloni sebagai Perdana Menteri pada Oktober 2022 menandai fase baru sekuritisasi migrasi Italia yang cenderung lebih radikal dan terstruktur. Kampanye elektoral Meloni memposisikan migrasi sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas nasional Italia, dengan janji utama menghentikan kapal migran yang menggunakan Italia sebagai gerbang masuk Eropa (Nadeau, 2023). Hal ini sejalan dengan manifesto partai Fratelli d'Italia (FdI) berjudul *"Pronti a risollevare l'Italia"* menegaskan komitmen memerangi imigrasi ilegal melalui penguatan

perbatasan, pemblokiran pendaratan, dan pembentukan hotspot di luar wilayah Uni Eropa untuk memproses permohonan suaka (Echeverria & Finotelli, 2024, p. 240)

Meloni, sebagai aktor yang mendorong proses sekuritisasi terhadap migran tampak digerakkan oleh kombinasi antara orientasi ideologis partai, perhitungan elektoral, dan ambisi geopolitik yang ingin ia tekankan dalam kebijakan luar negerinya. Pertama, motivasi ideologis Meloni dalam mensekuritisasi migrasi bersumber dari komitmen mendalam terhadap nasionalisme etno-kultural yang dianut FdI. Meloni secara implisit mengadopsi *great replacement theory*, yang percaya bahwa imigrasi ke Barat merupakan rekayasa sistematis untuk menggantikan populasi asli, bukan gerakan organik akibat kemiskinan dan konflik (Kirchgaessner, 2023). Dalam berbagai pidato kampanye, Meloni merujuk langkah pro-imigrasi sebagai bagian dari konspirasi sayap kiri untuk "menggantikan orang Italia dengan imigran" (Deliso, 2022). Retorika ini koheren dengan ideologi FdI yang menekankan supremasi identitas nasional Italia berdasarkan kesamaan etnis dan budaya. Meloni menolak *Ius Scholae*, rancangan undang-undang yang mengusulkan hak kewarganegaraan bagi anak imigran di bawah 12 tahun yang menempuh pendidikan di Italia, dengan argumen bahwa kewarganegaraan harus berbasis pada ikatan darah (*ius sanguinis*), bukan residensi (Deliso, 2022). Pendekatan yang condong pada *great replacement theory* dan penolakan terhadap model kewarganegaraan inklusif menunjukkan bahwa sekuritisasi migrasi oleh Meloni bukan sekadar strategi politik pragmatis, tetapi manifestasi dari komitmen ideologis terhadap nasionalisme eksklusif yang berakar pada warisan neo-fasis FdI.

Kedua, kalkulasi elektoral turut membentuk motivasi Meloni dalam strategi sekuritisasi yakni dengan memanfaatkan eskalasi kekhawatiran publik terhadap migrasi pasca 2015. Polling tahun 2018 menunjukkan 35 persen responden Italia menganggap imigrasi sebagai isu paling penting yang dihadapi negara, meningkat 17 poin persentase dari 2014 (Deliso, 2022). Data Eurobarometer 2021 turut mengonfirmasi tren ini, dengan 58 persen warga Italia menginginkan kebijakan migrasi yang lebih ketat (European Commission, 2021). Meloni secara strategis mengeksploitasi sentimen ini melalui dominasi media sosial, menjadikan FdI sebagai partai paling aktif di Twitter dengan hampir 9.000 tweet selama kampanye pemilu 2022, jauh mengungguli Partai Demokrat yang tidak mencapai 2.500 tweet (Grillo & Ventura, 2023). Konten media sosial FdI secara konsisten membingkai migrasi sebagai ancaman keamanan dan ekonomi, menggunakan narasi "Italia untuk orang Italia" dan citra visual dramatik tentang "invasi" migran (Grillo & Ventura, 2023). Strategi ini terbukti efektif dalam memobilisasi basis pemilih sayap kanan, dengan FdI meraih 26 persen suara dalam pemilu September 2022, naik drastis dari 4,4 persen pada 2018 (Echeverria & Finotelli, 2024, p. 235). Eksploitasi media sosial dengan retorika anti-imigrasi tidak hanya memungkinkan Meloni memenangkan pemilu, tetapi juga menjadi mekanisme konsolidasi dukungan dengan memanfaatkan sentimen publik yang semakin negatif terhadap migran.

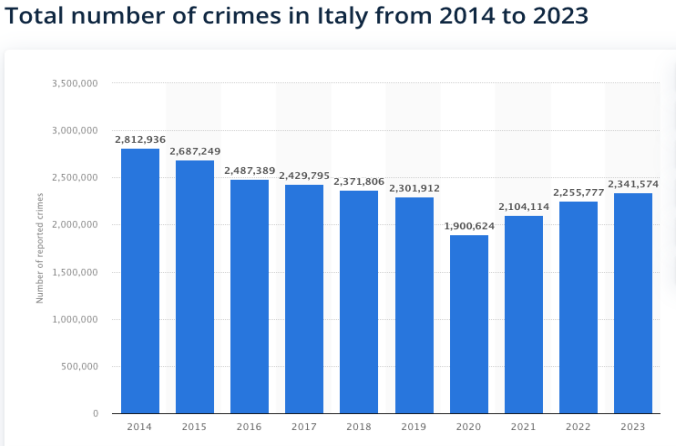
Ketiga, Meloni memiliki ambisi geopolitik untuk menjadikan Italia sebagai pemimpin regional dalam agenda migrasi Uni Eropa. Hal ini diwujudkan melalui strategi eksternalisasi kontrol migrasi seperti ke Afrika Utara, Tunisia, dan Albania. Pada akhir 2023, Meloni telah melakukan 14 kunjungan ke Afrika, dengan 11 kunjungan difokuskan ke Afrika Utara sebagai wilayah transit utama migrasi menuju Italia (Giuliani, 2024). Pada Juli 2023, Meloni memfasilitasi penandatanganan kesepakatan EU-Tunisia senilai €105 juta, didampingi Presiden Komisi Eropa Ursula

von der Leyen dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte untuk memperkuat kontrol perbatasan Tunisia dan mencegah keberangkatan kapal migran (Giuliani, 2024). Di sisi lain, kesepakatan Italia-Albania pada November 2023 untuk pembangunan pusat penahanan migran di wilayah Albania mengungkapkan agenda eksternalisasi yang lebih fundamental dengan memindahkan pemrosesan suaka ke luar wilayah yurisdiksi Uni Eropa (Euronews, 2023). Pada Januari 2024, Italia meluncurkan "Mattei Plan for Africa" dengan komitmen investasi €5,5 miliar yang menghubungkan pembangunan ekonomi Afrika dengan pengurangan migrasi ke Eropa (Giuliani, 2024). Pemerintah Meloni menegaskan bahwa Mattei Plan bertujuan mengatasi "akar penyebab migrasi" melalui penciptaan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi di negara asal migran (Giuliani, 2024). Diplomasi migrasi intensif Meloni ke Afrika Utara dan formalisasi kesepakatan bilateral dengan Tunisia dan Albania menunjukkan upaya sistematis dalam mengkonversi isu migrasi domestik menjadi *leverage* diplomatik regional, sekaligus memperkuat narasi bahwa migrasi merupakan ancaman yang memerlukan respons geopolitik komprehensif melintasi batas nasional.

**Migran sebagai *Existential Threat* yang Mengancam Keamanan Nasional Italia**

Pada sub-bab sebelumnya, dapat dilihat bagaimana pemerintah Italia di bawah Perdana Menteri Giorgia Meloni sebagai aktor sekuritisasi mulai mengkonstruksikan migrasi sebagai suatu ancaman. Dalam hal ini, migran dipandang sebagai *existential threat* yang mengancam keamanan nasional Italia selaku *referent object*. Adapun terdapat dua kategori persepsi ancaman yang saling memperkuat sejak era pemerintahan Meloni dimulai pada Oktober 2022 yakni ancaman keamanan dan kriminalitas serta ancaman terhadap identitas kultural.

Persepsi ancaman keamanan mengalami peningkatan dramatis di era Meloni meskipun data kriminalitas menunjukkan tren yang kontradiktif. Sentimen publik bahwa migran merupakan ancaman keamanan meningkat drastis dari 27 persen pada 2021 menjadi 32 persen pada 2022, dan mencapai 46 persen pada 2023, hampir dua kali lipat dalam dua tahun sejak Meloni menjabat (Statista, 2024). Konstruksi ancaman ini diperkuat oleh data selektif yang menyoroti bahwa per Juni 2022, 31 persen narapidana di penjara Italia adalah warga negara asing, meningkat dari 15,13 persen pada 1991 (Formicola, 2022).




**Gambar 2. Grafik Angka Kejahatan di Italia dalam rentang tahun 2014-2023**
Sumber: Statista (data from ISTAT). "Total Number of Crimes in Italy from 2014 to 2023." September 10, 2024.

Data resmi ISTAT (Italian National Institute of Statistics) menunjukkan kompleksitas yang berbeda dari narasi ancaman ini. Jumlah total kejahatan di Italia justru mengalami penurunan jangka panjang dari 2,81 juta kasus pada 2014 menjadi 1,90 juta kasus pada 2020, namun kemudian meningkat kembali menjadi 2,34 juta kasus pada 2023 (Statista, 2024). Paradoks yang paling signifikan terlihat pada periode 2015-2016 ketika Italia mengalami lonjakan kedatangan migran dari 153.842 pada 2015 menjadi 181.436 pada 2016, namun tingkat kejahatan justru terus menurun dari 2,69 juta kasus pada 2015 menjadi 2,49 juta kasus pada 2016 (IOM, 2017). Meskipun terjadi kenaikan moderat pasca-pandemi COVID-19, angka kejahatan pada 2023 masih berada 17 persen lebih rendah dibandingkan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa eskalasi persepsi ancaman yang hampir dua kali lipat tidak sebanding dengan kenaikan aktual dari tingkat kriminalitas di Italia.

Kategori ancaman identitas kultural turut mengalami eskalasi signifikan di era Meloni, didorong oleh persepsi publik yang terdistorsi mengenai skala dan komposisi migran di Italia. Survei di tahun 2017 menunjukkan bahwa responden Italia secara rata-rata memperkirakan proporsi imigran non-Uni Eropa di Italia mencapai 24,6 persen, sementara angka aktual hanya 7 persen, menjadikan Italia negara dengan tingkat kesalahan estimasi tertinggi di Uni Eropa (ODI, 2021). Overestimasi dramatis ini menciptakan fondasi bagi konstruksi ancaman eksistensial terhadap identitas nasional Italia yang terus diperkuat oleh narasi politik pemerintahan Meloni. Berdasarkan data yang menunjukkan 5,3 juta warga negara asing yang tinggal di Italia pada awal 2024, 47 persen berasal dari negara Eropa lainnya. Sementara, 53 persen sisanya berasal dari luar Eropa, dengan 31,8 persen berasal dari negara tradisi kultural kristen dan 21 persen sisanya berasal dari latar belakang kultural lain. (Ambrosini, 2024). Dengan demikian, sekitar 78,8 persen dari total populasi migran di Italia memiliki latar belakang Eropa atau kristen. Namun, wacana politik di era Meloni terus membingkai imigrasi sebagai "invasi massal" yang mengancam kohesi sosial dan identitas nasional. Hal ini salah satunya didukung dari bagaimana Meloni secara khusus menggarisbawahi masalah kompatibilitas antara budaya islam dan nilai-nilai peradaban Italia. Meloni menarasikan bagaimana Eropa mengalami proses islamisasi yang sangat jauh dari nilai-nilai peradaban mereka dan mengusulkan pembatasan terhadap pusat-pusat kebudayaan islam yang dianggap didanai oleh Arab Saudi (Outlook, 2024). Diskrepansi antara komposisi aktual latar belakang komposisi migran dengan ancaman yang terfokus pada minoritas muslim menunjukkan seleksi strategis dalam narasi sekuritisasi migrasi.

### *Speech Act* tentang Migran di Italia

Pemerintah Meloni kemudian mulai mengintensifkan *speech act* tentang migrasi sebagai ancaman eksistensial yang didorong oleh eskalasi sentimen publik atas tiga hal: 1) migran yang mengancam keamanan nasional; 2) meningkatnya kedatangan migran melalui rute Mediterania tengah yang mencapai 105.131 pada 2022 (Sea-Watch, 2022); dan 3) tekanan politik dari basis pemilih sayap kanan untuk memenuhi janji kampanye menghentikan "invasi" migran.

Dalam konteks ini, Meloni kemudian mengonstruksi Protokol Italia-Albania sebagai respons strategis terhadap kegagalan sistemik Uni Eropa dalam mengelola ancaman migrasi, sekaligus memposisikan Italia sebagai pemimpin regional dalam eksternalisasi penanganan krisis. Dalam pidato penandatanganan protokol pada 6

November 2023, Meloni secara eksplisit membingkai kesepakatan ini sebagai solusi terhadap ancaman yang tidak dapat ditangani secara unilateral:

> "*This agreement entails Albania giving Italy the possibility to use certain areas on Albanian territory to establish, at its own expense and under its own jurisdiction, two facilities to set up centres for the management of illegal migrants. These facilities will initially be able to take in up to three thousand people, who will remain in the centres for the time it takes to quickly carry out the procedures to process their asylum applications and, if necessary, for repatriation purposes... I consider this to be an agreement with a European scope, because it translates the awareness that immigration is a European phenomenon – a phenomenon that needs to be tackled through cooperation among the European Union's Member States as well as through cooperation between the EU and currently non-EU countries into concrete actions* (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2023)."

Narasi ini secara strategis memposisikan Protokol Italia-Albania bukan sebagai kebijakan unilateral yang kontroversial, tetapi sebagai model eksternalisasi yang dapat diadopsi oleh seluruh negara anggota Uni Eropa untuk mengatasi ancaman eksistensial migrasi. Pembingkaian migrasi sebagai "fenomena Eropa" yang memerlukan "*cooperation between the EU and currently non-EU countries*" mengonstruksi migran tidak hanya sebagai ancaman terhadap Italia, tetapi sebagai krisis kontinental yang membenarkan langkah-langkah luar biasa melintasi batas kedaulatan nasional.

Lebih lanjut, Meloni membingkai ancaman eksistensial migrasi melalui narasi tentang migran sebagai aktor yang gagal memenuhi standar *rule of law* dan dianggap memproduksi insekuritas sosial, yang hanya dapat diatasi melalui mekanisme deterensi seperti Protokol Italia-Albania. Dalam pidato kepada senior kepolisian Italia, Meloni secara eksplisit menghubungkan protokol dengan upaya menghentikan ancaman yang ditimbulkan oleh migrasi ilegal:

> "*Citizens are asking us to stop illegal immigration because it causes insecurity, lack of integration and an inability to guarantee the rule of law... In 2024, along the central Mediterranean route, with approximately 66,000 arrivals, 1,695 people were reported dead or missing. In 2023, with more than 157,000 irregular arrivals, 2,526 people were reported dead or missing. This means something simple, which we have repeated many times. Reducing the number of departures and stamping out trafficking is the only way to reduce the number of people who lose their lives attempting to reach Italy and Europe* (InfoMigrants, 2024)."

Retorika ini mengonstruksi dualitas dalam pembingkaian ancaman. Migran tidak hanya dipresentasikan sebagai pelaku yang mengancam keamanan, integrasi sosial, dan *rule of law* Italia, tetapi juga sebagai korban jaringan perdagangan manusia yang perlu "diselamatkan" melalui pencegahan keberangkatan. Logika "penyelamatan" ini melegitimasi eksternalisasi dan detensi sebagai kebijakan humaniter, bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menghubungkan penurunan jumlah kedatangan dari 157.000 pada 2023 menjadi 66.000 pada 2024 dengan pengurangan kematian migran di laut, Meloni mengonstruksi Protokol Italia-Albania sebagai instrumen yang tidak hanya melindungi keamanan Italia dari ancaman eksistensial migrasi tetapi juga menyelamatkan nyawa migran.

Meloni secara konsisten membingkai oposisi yudisial terhadap Protokol Italia-Albania sebagai obstruksi politik yang mengancam kedaulatan pemerintah dan kehendak rakyat Italia dalam melindungi diri dari ancaman migrasi. Dalam konferensi

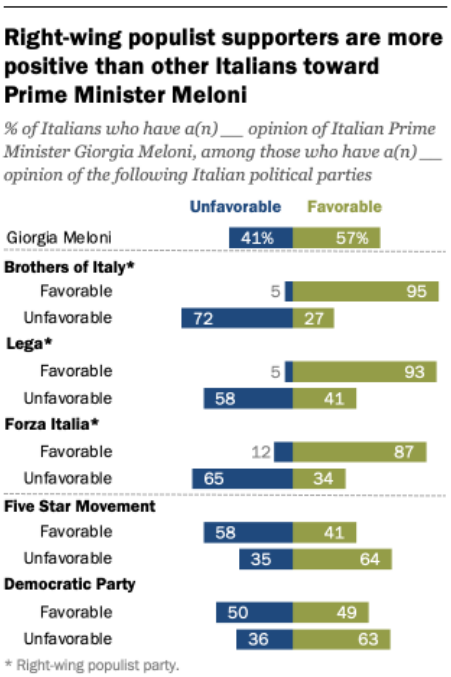
pers pada november 2025 dengan PM Albania, Edi Rama, pascaimplementasi protokol yang diblokir oleh pengadilan Italia, Meloni mempertahankan determinasi untuk melanjutkan skema tersebut sebagai satu-satunya solusi efektif:

> "*Many have worked to slow it down or block it, but we are determined to move forward because this mechanism has the capacity to change the entire paradigm... The Italy-Albania Protocol, which I would like to state this here too, the Government is determined to pursue, above all given the level of interest and support shown by an increasing number of European nations* (US News, 2024)."

Pembingkaian ini mengonstruksi dikotomi antara pemerintah yang responsif terhadap kehendak rakyat untuk dilindungi dari ancaman migrasi versus yudikatif yang dianggap politis dan menghalangi solusi terhadap krisis eksistensial. Dengan menekankan bahwa "*an increasing number of European nations*" menunjukkan minat terhadap model Italia-Albania, Meloni berupaya mengalihkan kritik domestik sebagai anomali yang tidak sejalan dengan tren Eropa. Narasi ini mentransformasi Protokol Italia-Albania dari kebijakan kontroversial yang melanggar hukum Uni Eropa menjadi mekanisme inovatif yang akan mengubah paradigma dalam penanganan migran di Uni Eropa. Italia seolah bergerak sebagai pionir yang berani melawan *status quo* untuk melindungi warganya dari ancaman yang mengancam keamanan, identitas, dan kesejahteraan nasional.

**Respons Audiens (Masyarakat Italia) terhadap *Speech Act* Giorgia Meloni**

Respons masyarakat Italia terhadap *speech act* sekuritisasi migrasi dan Protokol Italia-Albania menunjukkan fragmentasi. Berdasarkan afiliasi politik, dukungan konstituen sayap kanan sangat tinggi. Namun, terdapat penolakan tajam dari partai oposisi.




**Gambar 3.** Grafik Survei Pandangan Anggota Partai Italia terhadap PM Giorgia Meloni
Sumber: Pew Research Center. "Ahead of US visit, PM Giorgia Meloni viewed favorably by 60% of Italians." 25 Juli 2023.

Survei Pew Research Center pada periode Februari hingga April 2023 mengungkapkan bahwa 57 persen masyarakat Italia memiliki pandangan positif terhadap Meloni, dengan catatan bahwa terdapat polarisasi ekstrem di sepanjang garis partisan (Pew Research Center, 2023). Di kalangan pendukung partai populis sayap kanan yang membentuk koalisi pemerintah, yaitu Fratelli d'Italia, Lega, dan Forza Italia, dukungan terhadap Meloni mencapai tingkat luar biasa tinggi: 95 persen pendukung Fratelli d'Italia, 93 persen pendukung Lega, dan 87 persen pendukung Forza Italia menyatakan pandangan positif (Pew Research Center, 2023). Tingkat dukungan yang hampir absolut ini mencerminkan kesuksesan narasi sekuritisasi migrasi dalam mengonsolidasasi basis elektoral sayap kanan di balik agenda eksternalisasi penanganan migran. Sebaliknya, dukungan terhadap Meloni runtuh drastis di kalangan pendukung partai oposisi. 41 persen pendukung Five Star Movement dan 49 persen pendukung Democratic Party yang menyatakan pandangan positif, menandakan penolakan substantif terhadap pendekatan sekuritisasi pemerintah (Pew Research Center, 2023). Fragmentasi respons yang tajam ini mengindikasikan bahwa *speech act* sekuritisasi Meloni berhasil memperdalam polarisasi politik Italia, di mana narasi ancaman eksistensial migrasi berfungsi sebagai mekanisme mobilisasi partisan yang memecah masyarakat berdasarkan orientasi ideologis.



**Share of Italians who have a favorable opinion of Giorgia Meloni's government in 2025, by policy area**

| Characteristic | Share of respondents |
|---|---|
| Foreign policy | 44% |
| Management of the National Recovery and Resilience Plan (NextGeneration EU) | 38% |
| Economy | 36% |
| Strategic infrastructures | 33% |
| Employment | 32% |
| Public security | 32% |
| Environment | 32% |
| Fight against tax evasion | 31% |
| Taxation | 29% |
| Immigration | 29% |
| Education | 28% |
| Anti-poverty measures | 26% |
| Healthcare | 25% |

**Gambar 4. Grafik Survei Kepuasan terhadap PM Giorgia Meloni berdasarkan Area Kebijakan**

Sumber: Statista. "Share of Italians who have a favorable opinion of Giorgia Meloni's government in 2024, by policy area." 19 Februari 2024.

Sejak masa kampanye Meloni yang menempatkan migrasi sebagai isu sentral, data di awal tahun 2024 menunjukkan bagaimana kebijakan imigrasi pemerintahan Meloni yang cenderung restriktif justru dipersepsikan belum cukup ketat. Temuan survei SWG pada Februari 2024 menemukan bahwa hanya 29 persen responden yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Meloni atas isu migrasi. Data menempatkannya pada urutan keempat terbawah bersama dengan pendidikan (28%), langkah anti-kemiskinan (26%), dan kesehatan (25%) (Statista, 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan pemerintah belum memenuhi

ekspektasi publik yang menghendaki kontrol yang lebih ketat dan menciptakan preseden politik bagi Meloni untuk mengukuhkan kebijakan yang lebih restriktif. Hal ini diperkuat oleh data empiris yang menunjukan lonjakan migran signifikan dari 70.000 orang pada 2022 menjadi lebih dari 157.000 orang pada 2023 bahwa kerangka kebijakan yang diambil belum memenuhi deterensi yang diharapkan (Euronews, 2024). Pengakuan Meloni pada September 2023 bahwa "hasilnya tidak seperti yang kami harapkan" (Euronews, 2023) cenderung tidak menjadi pengakuan kegagalan politik, melainkan sebagai langkah diskursif yang strategis. Pernyataan yang lahir dari momentum tersebut membuka ruang legitimasi bagi penerapan *extraordinary measure*, dalam hal ini Protokol Italia-Albania, dengan membingkai eskalasi kebijakan sebagai respon rasional terhadap situasi yang dinilai semakin memburuk.

Fragmentasi respons kemudian terlihat dari penolakan tegas organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia internasional terhadap Protokol Italia-Albania sejak penandatanganannya pada November 2023. Human Rights Watch menyebut kesepakatan tersebut melanggar hukum internasional dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi kelompok rentan (Human Right Watch, 2024). Di sisi lain, Amnesty International mengecam kebijakan ini sebagai noda pada pemerintahan Italia yang melegalisasi penahanan otomatis pencari suaka (Amnesty International, 2024). Penolakan yudisial yang berulang dari pengadilan Roma terhadap implementasi protokol pada Oktober 2024, yang membatalkan penahanan migran di Albania dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Uni Eropa tentang negara aman, menunjukkan bahwa segmen institusional Italia menolak legitimasi mekanisme eksternalisasi ini (ASSEDEL, 2024). Respons audiens yang terfragmentasi ini mengkonfirmasi bahwa meskipun *speech act* sekuritisasi Meloni berhasil mengonsolidasikan dukungan dari basis pemilih sayap kanan, ia menghadapi resistensi substantif dari masyarakat sipil dan institusi yudisial yang mempertanyakan baik legalitas maupun efektivitas pendekatan eksternalisasi dalam mengatasi fenomena migrasi.

**Extraordinary Measure oleh Pemerintah Italia dalam Mengatasi Masalah Migran**

Meskipun menghadapi fragmentasi respon publik dan tantangan dari berbagai institusi domestik hingga internasional, Protokol Italia-Albania berhasil diratifikasi oleh Parlemen Italia pada 22 Februari 2024. Keberhasilan ratifikasi ini dimungkinkan oleh dominasi koalisi sayap kanan dalam parlemen, di mana Chamber of Deputies menyetujui protokol pada 24 Januari 2024 dan diikuti oleh Senate pada 15 Februari 2024 meskipun menghadapi kritik keras dari oposisi (NPR, 2024). Pada 22 Februari 2024, Parlemen Albania meratifikasi protokol dengan 77 suara dari 140 anggota parlemen, hanya didukung oleh mayoritas Partai Sosialis tanpa partisipasi oposisi, setelah Constitutional Court Albania memberikan lampu hijau pada 29 Januari 2024 dengan menyatakan protokol tidak melanggar konstitusi Albania (Euronews, 2024). Kesuksesan ratifikasi ini membuktikan bahwa *speech act* sekuritisasi yang berhasil mengonsolidasasi dukungan partisan sayap kanan mampu mentransformasi narasi ancaman eksistensial menjadi tindakan legislatif konkret, meskipun dihadapkan pada kritik substantif tentang legalitas dan konsekuensi humaniter.

Protokol ini merepresentasikan karakteristik klasik dari *extraordinary measures* dalam teori sekuritisasi karena mengoperasionalisasi langkah-langkah luar biasa. Dengan menciptakan kompleksitas yurisdiksi yang belum pernah ada melalui penahanan suaka di wilayah non-Uni Eropa, adanya penggunaan sumber daya militer

sebagai *coast guard*, dan membenarkan prosedur detensi otomatis yang dianggap *arbitrary*, sejatinya menjadi respons luar biasa terhadap ancaman eksistensial dari migrasi (Carrera et al., 2023). Eksternalisasi penanganan migran ini secara fundamental menggeser batas geografis dan yurisdiksi pengelolaan migrasi. Melalui mobilisasi aset militer angkatan laut Italia yang signifikan, di mana pencari suaka yang diselamatkan di perairan internasional oleh Italian Coast Guard dan Italian Navy langsung dibawa ke fasilitas di pelabuhan Shengjin dan area Gjadër di Albania menggunakan kapal perang seperti Libra dan Cassiopeia (Euromed Human Rights Monitor, 2024). Biaya operasional protokol mencapai angka fantastis 670 juta euro untuk periode lima tahun pertama, atau 14 kali lebih mahal dibandingkan pengelolaan di Italia (Refugee Law Initiative, 2024). Dengan kapasitas maksimal hanya 3.000 migran dari total 141.790 kedatangan pada 2023, protokol ini lebih berorientasi pada sinyal politik deterensi dan demonstrasi kontrol melalui kekuatan militer daripada efisiensi administratif atau solusi praktis terhadap manajemen migrasi (Refugee Law Initiative, 2024).

Meskipun *extraordinary measure* ini dilegitimasi melalui proses legislatif formal dengan ratifikasi parlemen, implementasinya menghadapi resistensi substansial dari institusi yudisial. Pengadilan menolak memberikan legitimasi hukum terhadap praktik yang dinilai bertentangan dengan hukum Uni Eropa dan standar perlindungan HAM, khususnya dalam konteks penggunaan prosedur percepatan dan penahanan administratif terhadap pencari suaka. Putusan Mahkamah Agung Uni Eropa (ECJ) pada 4 Oktober 2024 dalam perkara C-406/22 menegaskan bahwa penetapan negara sebagai *safe country of origin* menjadi prasyarat hukum bagi penerapan prosedur percepatan di perbatasan (FAMIMOVE, 2024). ECJ menegaskan bahwa negara diklasifikasikan aman apabila seluruh wilayahnya bebas dari resiko persekusi maupun perlakuan tidak manusiawi, bukan hanya aman di sebagian wilayah. Sehingga, pemohon suaka dari negara yang tidak memenuhi standar 'aman' ini berhak atas pemeriksaan substansial permohonannya dan tidak dikenai prosedur percepatan. Berdasarkan kerangka hukum ini, Pengadilan Roma pada 18 Oktober 2024 menolak memvalidasi penahanan 12 pencari suaka pertama yang dipindahkan ke Albania dengan alasan bahwa Mesir dan Bangladesh (negara asal pemohon) tidak dapat diklasifikasikan sebagai negara aman. Sehingga, penerapan prosedur percepatan termasuk penahanan administratif di Albania yang memindahkan pemohon ke luar wilayah Uni Eropa sebagai dasar protokol, dinyatakan tidak sah. Keputusan yudisial ini secara langsung memaksa pemerintah Italia untuk memulangkan 12 pencari suaka kembali ke Italia, menandai kegagalan awal implementasi Protokol Italia-Albania yang baru mulai beroperasi pada 14 Oktober 2024 (MedMa, 2024).

Alih-alih menerima batasan yudisial, pemerintah Meloni mengintensifkan rangkaian *extraordinary measures* tambahan untuk mempertahankan protokol dengan mengeluarkan Dekrit Hukum No. 158 pada 23 Oktober 2024 (MedMA, 2024). Dekrit ini mentransformasi daftar negara aman milik Italia dari dekrit antar-kementerian menjadi undang-undang primer. Hal ini bertujuan untuk membatasi kekuatan uji yudisial dalam mengintervensi penetapan negara aman dan memposisikan pemerintah Italia sebagai satu-satunya aktor yang berwenang menentukan negara yang mereka anggap aman (The European Conservative, 2024).

Pola resistensi dan eskalasi *extraordinary measures* ini berlanjut ketika pemerintah melakukan upaya kedua pada 5 November 2024. Pemerintah Italia

membawa delapan migran laki-laki dari Bangladesh dan Mesir ke Albania, namun Pengadilan Roma kembali membatalkan penahanan tujuh dari mereka pada 11 November 2024 dan merujuk kasus tersebut ke Mahkamah Agung Uni Eropa untuk klarifikasi lebih lanjut tentang konsep negara aman (Euronews, 2024). Kegagalan berulang ini tidak menghentikan determinasi pemerintah Meloni untuk mengoperasikan protokol, yang kemudian mengubah strategi dengan mengeluarkan Dekrit Hukum No. 37 pada 28 Maret 2025. Dekrit ini mengamandemen Undang-Undang No. 14/2024 untuk memungkinkan fasilitas di Albania digunakan sebagai pusat deportasi bagi migran yang aplikasi suakanya sudah ditolak di Italia. Hal ini mentransformasi fungsi fasilitas tersebut dari pemrosesan suaka menjadi detensi deportasi (Maldusa, 2025). Pada 11 April 2025, 40 migran dipindahkan dari Italia ke Albania di bawah skema baru ini, menandai pergeseran paradigma dari eksternalisasi prosedur suaka menjadi eksternalisasi deportasi (Rocca, 2025). Rangkaian modifikasi legislatif intensif yang dilakukan melalui dekrit darurat, disertai dengan pengabaian terhadap keputusan yudisial mengkonfirmasi bahwa Protokol Italia-Albania beroperasi sebagai *extraordinary measure*. Pemerintah secara konsisten menempatkan imperatif keamanan nasional di atas prosedur hukum normal dan *checks and balances* demokratis. Hal ini mendemonstrasikan bahwa *extraordinary measures* dalam sekuritisasi migrasi bukan sekadar respons teknis terhadap krisis tetapi mekanisme politik yang mempertahankan narasi ancaman eksistensial meskipun menghadapi resistensi institusional.

## 4. Kesimpulan

Pemerintah Italia di bawah Perdana Menteri Giorgia Meloni mengonstruksi migrasi sebagai isu keamanan melalui pembingkaian diskursif migran yang dilembagakan melalui Protokol Italia-Albania. Proses konstruksi kemudian menunjukkan transisi antartahapan yang tidak linear, melainkan bersifat kontestasional dan terfragmentasi. Pemerintah relatif berhasil membingkai migran sebagai ancaman terhadap keamanan dan identitas nasional melalui narasi yang ditopang oleh faktor ideologis, kepentingan elektoral, serta ambisi geopolitik Italia di kawasan. Namun, konstruksi ancaman ini mengandung kontradiksi yang cukup kontras, dimana persepsi publik mengenai migran sebagai sumber ancaman meningkat tajam sementara data resmi justru memperlihatkan tren penurunan tingkat kejahatan. Respon audiens cenderung terfragmentasi dengan dukungan kuat yang datang dari basis elektoral sayap kanan disertai penolakan substantif yang muncul dari masyarakat sipil dan institusi yudisial. Fragmentasi ini menunjukkan bahwa transisi menuju *extraordinary measure* tidak beroperasi secara linear tetapi melalui kontestasi berkelanjutan yang mendemonstrasikan ketegangan antara imperatif keamanan dan antar institusi pemerintahan.

Pada tahap implementasinya, Protokol Italia-Albania menjadi ilustrasi bagaimana penerapan *extraordinary measure* beroperasi di bawah tekanan *check and balance* demokratis. Eksternalisasi pemrosesan suaka Italia ke luar wilayah Uni Eropa, memicu kontestasi yudisial dan mendorong pemerintah mengeluarkan serangkaian dekrit darurat sebagai bentuk intensifikasi *extraordinary measure*. Protokol ini menjadi mekanisme yang secara implisit menghindari prosedural hukum Uni Eropa terkait pemrosesan suaka dengan kategorisasi tidak sensitif dan tidak selaras dengan standar HAM Uni Eropa terhadap migran. Dampaknya, ruang perlindungan hukum bagi migran secara sistematis menyempit. Dinamika ini menunjukkan bahwa

sekuritisasi isu migrasi di Italia turut menjadi instrumen politik yang secara aktif membentuk ulang batas-batas hukum yang kian memarjinalisasi status migran.

## 5. Daftar Pustaka


ABC News. (2022, October 27). *Migrants in Italy Face Uncertainty after Prime Minister's Win*. https://abcnews.go.com/International/migrants-italy-face-uncertainty-prime-ministers-win/story?id=90916653.

Finotelli, Claudia. (2023). *Migration and Migration Policy in Italy*. Federal Agency for Civic Education (bpb). https://www.bpb.de/themen/migration-integration/regionalprofile/english-version-country-profiles/505169/migration-and-migration-policy-in-italy/.

Ambrosini, Maurizio. (2024, September 20). *Migration in Italy: Between Facts and Public Perception*. Federal Agency for Civic Education (bpb). https://www.bpb.de/themen/migration-integration/regionalprofile/english-version-country-profiles/552387/migration-in-italy-between-facts-and-public-perception/.

Asylum Information Database (AIDA). (2023). *Conditions in Reception Facilities*. Asylum in Europe. https://asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/housing/conditions-reception-facilities/.

Ben-Ghiat, Ruth. (2022, September 26). *Giorgia Meloni and the Return of Fascism: How Italy Got Here.* The Conversation. https://theconversation.com/giorgia-meloni-and-the-return-of-fascism-how-italy-got-here-190866.

Brookings Institution. (2020). *When Is Migration a Security Issue?.* Brookings. https://www.brookings.edu/articles/when-is-migration-a-security-issue/.

Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. (1998). Security: A New Framework for Analysis*.* London: Lynne Rienner Publishers, 1998.

CNN. (2023, April 23). *Giorgia Meloni's Political Balancing Act amid Italy's Migrant Surge*. *CNN.* https://www.cnn.com/2023/04/23/europe/meloni-italy-migrants-politics-intl/index.html.

Deliso, Meredith. (2022, September 26). *Migrants in Italy Face Uncertainty after Far-Right Prime Minister's Win*. ABC News. https://abcnews.go.com/International/migrants-italy-face-uncertainty-prime-ministers-win/story?id=90916653.

Denison, James. (2020). The Centre No Longer Holds: The Lega, Matteo Salvini and the Remaking of Italian Immigration Politics. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 46, no. 3, 423–441.

Echeverría, Gabriel, and Claudia Finotelli. (2024). Much Ado about Nothing? Giorgia Meloni's Government and Immigration. *Contemporary Italian Politics* 16, no. 2, 233-252.

Eurobarometer. (2021). *Public Opinion on Migration in the European Union*. European Commission. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2269.

Euronews. (2023). *Analysis: With Her Albania Deal, Giorgia Meloni Sets the Pace for EU Migration Policy*. Euronews. https://www.euronews.com/my-europe/2023/11/14/analysis-with-her-albania-deal-giorgia-meloni-sets-the-pace-for-eu-migration-policy.

FAMIMOVE. (2024). *Back to square one: The Italy-Albania Protocol and the test of (un)safe third countries of origin*. https://famimove.unimib.it/back-to-square-

one-the-italy-albania-protocol-and-the-test-of-unsafe-third-countries-of-origin/.

Foreign Policy. (2024). *Meloni's Migration Pact with Albania Exposes Europe's Fault Lines*. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2024/12/05/meloni-italy-albania-migration-refugees-europe/.

Formicola, Lorenza. (2022). *This is How Unchecked Immigration Has Led Us to a Security Crisis*. Centro Machiavelli. https://www.centromachiavelli.com/en/2022/07/28/immigration-criminality-italy-data/.

Giuliani, Cristina. (2024). *Two Years of Anti-Immigrant Policy in Giorgia Meloni's Italy*. InfoMigrants. https://www.infomigrants.net/en/post/60758/two-years-of-antiimmigrant-policy-in-giorgia-melonis-italy.

Grillo, Francesco, and Sofia Ventura. (2023). *Only the Pragmatic Survive: The Meloni Government's Struggle with Migration*. Illiberalism Studies Program. https://www.illiberalism.org/only-the-pragmatic-survive-the-meloni-governments-struggle-with-migration/.

Human Rights Watch. (2024). *World Report 2024: Italy*. Human Rights Watch.. https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/italy.

International Organization for Migration (IOM). (2017). *Mediterranean Migrant Arrivals Top 363,348 in 2016; Deaths at Sea: 5,079*. IOM. https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-top-363348-2016-deaths-sea-5079.

InfoMigrants. (2024). *Italy: Meloni Vows to Do Everything She Can to Make Albania Plan Work*. https://www.infomigrants.net/en/post/62924/italy-meloni-vows-to-do-everything-she-can-to-make-albania-plan-work.

International Organization for Migration (IOM). (2024). *World Migration Report 2024 Reveals Latest Global Trends and Challenges in Human Mobility*. IOM. https://www.iom.int/news/world-migration-report-2024-reveals-latest-global-trends-and-challenges-human-mobility.

Kirchgaessner, Stephanie. (2023). *How Giorgia Meloni and the 'Great Replacement' Went Mainstream in Italy*. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2023/05/08/italy-meloni-great-replacement-conspiracy-theory-immigration/.

Migration Policy Institute. (2015). *Europe's Migration Crisis in Context: Why Now and What Next?*. Migration Policy Institute. https://migrationpolicy.org/article/europe's-migration-crisis-context-why-now-and-what-next.

MedMA. (2024). *Offshoring Migration- Risking Rights: The Italy–Albania Migration Protocol in the EU's Externalization Playbook*. https://med-ma.eu/publications/offshoring-migration-risking-rights-the-italy-albania-migration-protocol-in-the-eus-externalization-playbook/.

Nadeau, Barbie Latza. (2023). *Italy's Meloni Struggles with Migration Despite Tough Talk*. CNN. https://www.cnn.com/2023/04/23/europe/meloni-italy-migrants-politics-intl/index.html.

ODI. (2021, December 3). *Public Narratives and Attitudes Towards Refugees and Other Migrants: Italy Country Profile*. ODI: Think Change. https://odi.org/en/publications/public-narratives-and-attitudes-towards-refugees-and-other-migrants-italy-country-profile/.

Pepe, Claudia. (2024). *The Collapsing Migrants Reception and the Involution of the Italian System: The ActionAid Report 2024*. University of Padua Human Rights Centre. https://unipd-centrodirittiumani.it/en/topics/the-collapsing-migrants-reception-and-the-involution-of-the-italian-system-the-actionaid-report-2024.

Presidenza del Consiglio dei Ministri. (2023, November 6). *President Meloni's Press Statement with the Prime Minister of Albania*. https://www.governo.it/en/articolo/president-meloni-s-press-statement-prime-minister-albania/24195.

Presidenza del Consiglio dei Ministri. (2024, December 7). *President Meloni's Speech at the Conference of Italy's Prefects and Police Commissioners*.